

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH CAIR PADA RUMAH POTONG HEWAN DI KELURAHAN SILAIANG BAWAH KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Andalas*



Oleh :

FEBBY AULIA LESTARI

NOMOR BP: 1510112166

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA
ALAM (PK VIII)**

Pembimbing I : SYOFIARTI, S.H., M.HUM

Pembimbing II : ROMI, S.H., M.H

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

	No. Alumni Universitas:	Nama Alumni: FEBBY AULIA LESTARI	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi/24 Juli 1996 b) Nama Orang Tua : Rizal dan Susilawati c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Agraria dan SDA e) No. BP : 1510112166	f) Tanggal Lulus : 30 Desember 2019 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) Lama Studi : 4 Tahun 4 Bulan i) IPK : 3,68 j) Alamat : Jl. Irigasi No. 73, Padang	

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH CAIR PADA RUMAH POTONG HEWAN DI SILAIANG BAWAH KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG

(Febby Aulia Lestari, 1510112166, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 81 halaman)

ABSTRAK

Pasal 68 butir c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Bagi setiap pelaku usaha diwajibkan untuk menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup”. Namun faktanya, salah satu pelaku usaha Rumah Potong Hewan di Kota Padang Panjang diduga melanggar ketentuan baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk penegakan hukum administratif terhadap pencemaran limbah cair pada rumah potong hewan di Kelurahan Silaiang Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang? 2) Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum administratif terhadap pencemaran limbah cair pada Rumah Potong Hewan di Kelurahan Silaiang Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil, yakni: 1) Penegakan hukum administratif terhadap usaha rumah potong hewan Kota Padang Panjang belum pernah dilakukan sama sekali karena menurut asumsi mereka usaha rumah potong hewan Kota Padang Panjang belum memiliki izin lingkungan sehingga tidak menjadi objek pengawasan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. 2) Ada dua kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yang pertama kendala yuridis yaitu ketiadaan peraturan daerah Kota Padang Panjang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sedangkan yang kedua kendala non yuridisnya yaitu kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha akan patuh hukum serta kewajiban melindungi dan mengelola lingkungan hidup serta ketiadaan laporan dari masyarakat sekitar.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum Administratif, Pencemaran Limbah Cair, Rumah Potong Hewan*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 30 Desember 2019. Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H	Dr. Anton Rosari, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : Gusminarti, S.H., M.H


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas /Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: